

PENGARUH PENERAPAN PERGUB STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (UPTDSIDOARJO)

Iqbal Adhitya Almas*

***) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Indonesia, iqbalalmasgph@gmail.com**

ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan ialah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dan path analisis. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (UPTD Sidoarjo). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan semakin baik, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengawasan, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

The quality of financial statements is the final outcome of the accounting activity process of a summary of financial transactions. This research aims at empirically testing the Government Accounting Standards (SAP) and supervision over the quality of financial statements. This research uses premier data obtained directly from selected respondents at the research site. The analytical techniques used in this study use multiple linear regression techniques and analysis paths. This study was conducted on the Regional Revenue Board of East Java Province (UPTD Sidoarjo). The results showed that the government accounting standard (SAP) has a positive effect on the quality of financial statements, which means that the implementation of government accounting standards is getting better, the better the quality of financial statements are generated.

Keywords: Standard Government Accounting (SAP), Supervision, Quality Financial Report

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

Pengawasan yang optimal pada kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut di sajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Penerapan akuntansi yang baik pada pemerintahan dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan di harapkan akan memperbaiki kinerja pemerintahan dan meminimalkan korupsi sehingga good governance dapat terwujud oleh pemerintahan Indonesia.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan SAP dan pengawasan. Penerapan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintahan yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Semakin baik tingkat penerapan SAP pada suatu organisasi, maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangannya. Penyampaian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan LASOMA (2012) yang menyatakan bahwa penerapan SAP mempengaruhi baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan.

Pengawasan laporan keuangan merupakan kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu ikatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan agak pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksana kegiatan dengan tujuan pengendalian laporan keuangan. Penyampaian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alin (2015) yang menyatakan bahwa laporan keuangan berpengaruh positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah penelitian yaitu: pertama, apakah penerapan PERGUB Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur; dan kedua, apakah pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di kemukakan , maka tujuan tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual pada pendapatan daerah provinsi jawa timur. Fokus evaluasi yaitu pada: pertama, untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (UPTD Sidoarjo); kedua untuk menganalisis pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (UPTD Sidoarjo).

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Dapat meningkatkan kompetensi ke ilmunan dan menambah wawasan bagi peneliti.
2. Bagi Instansi
Dapat mengetahui seberapa pentingnya penerapan SAP dan pengawasan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual pada Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur (UPTD Sidoarjo).
3. Bagi Akademi
Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.
4. Bagi Pembaca
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2016: 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bastian (2013: 9) menyatakan bahwa: “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”. Sementara menurut Mahmudi (2013: 143) menyatakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. PERGUB no 5 tahun 2017 tentang standar akuntansi pemerintah. Tujuannya sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun standar akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan akhir dari proses akuntansi yang sudah atau telah dilakukan. Laporan keuangan disusun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dinyatakan dalam PP No 71/2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian akan dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Definisi Pelaporan

Dengan kesesuaian PP No. 71/2010, setiap entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut:

1. Akuntabilitas Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Menurut Mahmudi (2011) menyatakan bahwa Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring berkembangnya akuntansi di sektor komersial yang dipelopori dengan dikeluarkannya SAP oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Kementerian keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi, seperti adanya organisasi komersial. Keputusan dalam organisasi pemerintahan pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, Informasi bahasa sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain oleh karena itu, pemerintah memerlukan Standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar akuntansi pemerintahan maka pemerintah pusat dan pemerintahan setelah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara internasional.

Berdasarkan Pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah sangat penting dan juga suatu pedoman bagi penerapan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.

Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu ikatan tidak menyimpang dari tujuan yang sudah di tetapkan. Karena pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan tujuan rencananya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahan. Menurut Halim dan Iqbal, (2012:37): “Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam praktek sebagai berikut ini:

1. Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (expense) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi Karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.

2. Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas
3. Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek
4. Pengakuan seluruh kewajibandengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.

Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual akan mencakup hal-hal seperti:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kas nya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
4. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Cooper dan Scindler (2014:146) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif sering digunakan untuk mengukur perilaku, pengetahuan atau sikap. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi pada staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (UPTD Sidoarjo) dalam penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (UPTD Sidoarjo) yang berlokasi di Jalan Pahlawan No.41, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian. Jika surat ijin penelitian sudah dikeluarkan pada bulan Maret 2020, Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2020

Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini meliputi konsekuensi penerapan SAP dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual yang dilaksanakan pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (XI), Variabel Pengawasan (X2) dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y1)

Metode Analisa Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan membuktikan bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung variabel standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan terhadap laporan keuangan berbasis akrual. Maka uji statistik yang dipakai adalah analisis jalur (Path Analisis)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sidoarjo, merupakan UPT yang melaksanakan tugas-tugas teknik oprasional di lapangan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Badan Pendapatan adalah Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Dimana UPT Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis oprasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini kusioner ditunjukkan kepada bendahara pemasukan dan kepala subbagian keuangan. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penlitain ini kuesioner dibagikan sejumlah 28 lembar dan kusioner kembali 28 lembar.

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karakteristeik responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : menurut gender, Usia dan pendidikan terakhir. Deskripsi responde berdasar gender Deskripsi responden berdasarkan gender dapat dilihat pada tabel 1 dibawah:

Tabel
Reponden berdasarkan gender

Gender	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	13	46%
Perempuan	15	54%
Jumlah	28	100%

Karakteristik responden berdasar gender tabel diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian, jumlah responden dengan gender laki-laki yaitu sebanyak 13 orang (46%), sedang jumlah responden dengan gender perempuan sebanyak 15 orang (54%) Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Deskripsi responden berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Responden Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah	Persentase
21-30	9	32%
31-40	12	43%
41-50	6	21%
50>	1	4%
Jumlah	28	100%

Usia responden/karyawan UPTD Sidoarjo menunjukkan bahwa dlam peneliatain ini usia karyawan yaitu usia 21-30 tahun sebanyak 9 orang(32%), 31-40 tahun sebanyak 12 orang (43%), 41-50 tahun sebanyak 6 orang (21%) sedang karyawan diatas 50 tahun sebanyak 1 orang (4%). Deskripsi responden berdasarkan pendidikan dapat diliat pada tabel berikut:

Tabel
Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	0	0%
Diploma	11	39%
Sarjana	15	54%
Pasca Sarjana	2	7%
Jumlah	28	100%

Berdasarkan tabel di atas, responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 11 orang (39%), Pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 15 orang (54%), Pendidikan Terakhir Pasa Sarjana sebanyak 2 Orang (7%).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas atau kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu valid atau sah, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner. Adapun teknik korelasi yang biasa dipakai adalah teknik korelasi product moment dan untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan itu significant, maka dapat dilihat pada tabel nilai product moment atau menggunakan SPSS 24 untuk mengujinya. Untuk butir pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai instrument (Noor, 2011:132). Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi yang mendapat nilai lebih besar dari 0,325 (Sekaran dalam Augustine dan Kristaung, 2013:70). Setelah data diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner, maka data tersebut perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Bila instrumen atau alat ukur atau kuesioner tersebut tidak valid maupun reliabel, maka tidak akan diperoleh hasil penelitian yang baik (Noor, 2011:130, Zikmund). Noor (2011:130) menyatakan agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal, dalam penelitian ini, uji coba kuesioner melibatkan 28 responden/ semua karyawan. Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dari variable Kualitas Laporan Keuangan, Pengawasan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Correlations		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TT L
P1	Pearson Correlation	1	.353	1.000*	1.000*	.353	1.000*	.262	.607**
	Sig. (2-tailed)		.065	.000	.000	.065	.000	.178	.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
P2	Pearson Correlation	.353	1	.353	.353	1.000*	.353	.425*	.531**
	Sig. (2-tailed)	.065		.065	.065	.000	.065	.024	.004
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
P3	Pearson	1.000*	.353	1	1.000*	.353	1.000*	.262	.60

	Correlation	*			*		*		7**
	Sig. (2-tailed)	.000	.065		.000	.065	.000	.178	.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
P4	Pearson Correlation	1.000*	.353	1.000*	1	.353	1.000*	.262	.607**
	Sig. (2-tailed)	.000	.065	.000		.065	.000	.178	.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
P5	Pearson Correlation	.353	1.000*	.353	.353	1	.353	.425*	.531**
	Sig. (2-tailed)	.065	.000	.065	.065		.065	.024	.004
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
P6	Pearson Correlation	1.000*	.353	1.000*	1.000*	.353	1	.262	.607**
	Sig. (2-tailed)	.000	.065	.000	.000	.065		.178	.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
P7	Pearson Correlation	.262	.425*	.262	.262	.425*	.262	1	.596**
	Sig. (2-tailed)	.178	.024	.178	.178	.024	.178		.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
TTL	Pearson Correlation	.607**	.531**	.607**	.607**	.531**	.607**	.596**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.001	.001	.004	.001	.001	
	N	28	28	28	28	28	28	28	28
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

Tabel
Uji Validitas PERGUB Penerapan Standar Akuntansi

Correlations		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	TTL
P1	Pearson Correlation	1	.494*	.532*	1.000**	1.000**	.457*	.269	1.000**	.692*
	Sig. (2-tailed)		.008	.004	.000	.000	.014	.167	.000	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P2	Pearson Correlation	.494*	1	.409*	.494*	.494*	.375*	.286	.494*	.768*
	Sig. (2-tailed)	.008		.031	.008	.008	.050	.140	.008	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P3	Pearson	.532*	.409*	1	.532*	.532*	.422*	.293	.532*	.760*

	Correlation	*			*	*			*	*
	Sig. (2-tailed)	.004	.031		.004	.004	.025	.131	.004	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P4	Pearson Correlation	1.00 0**	.494* *	.532* *	1	1.00 0**	.457* *	.269	1.00 0**	.692* *
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.004		.000	.014	.167	.000	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P5	Pearson Correlation	1.00 0**	.494* *	.532* *	1.00 0**	1	.457* *	.269	1.00 0**	.692* *
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.004	.000		.014	.167	.000	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P6	Pearson Correlation	.457* *	.375* *	.422* *	.457* *	.457* *	1	.509* *	.457* *	.602* *
	Sig. (2-tailed)	.014	.050	.025	.014	.014		.006	.014	.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P7	Pearson Correlation	.269	.286	.293	.269	.269	.509* *	1	.269	.536* *
	Sig. (2-tailed)	.167	.140	.131	.167	.167	.006		.167	.003
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
P8	Pearson Correlation	1.00 0**	.494* *	.532* *	1.00 0**	1.00 0**	.457* *	.269	1	.692* *
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.004	.000	.000	.014	.167		.000
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28
T T L	Pearson Correlation	.692* *	.768* *	.760* *	.692* *	.692* *	.602* *	.536* *	.692* *	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.003	.000	
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel Pengawasan Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	TTL
P1	Pearson Correlation	1	.429* *	.509** **	.361	1.000** **	.377* *	.670** **
	Sig. (2-tailed)		.023	.006	.059	.000	.048	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28
P2	Pearson Correlation	.429* *	1	.529** **	.224	.429* *	.219	.650** **
	Sig. (2-tailed)	.023		.004	.252	.023	.264	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28
P3	Pearson Correlation	.509** **	.529** **	1	.360	.509** **	.346	.768** **
	Sig. (2-tailed)	.006	.004		.060	.006	.071	.000
	N	28	28	28	28	28	28	28
P4	Pearson Correlation	.361	.224	.360	1	.361	.352	.688** **
	Sig. (2-tailed)	.059	.252	.060		.059	.066	.000

N		28	28	28	28	28	28	28
P5	Pearson Correlation	1.000**	.429*	.509**	.361	1	.377*	.670**
	Sig. (2-tailed)	.000	.023	.006	.059		.048	.000
N		28	28	28	28	28	28	28
P6	Pearson Correlation	.377*	.219	.346	.352	.377*	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	.048	.264	.071	.066	.048		.000
N		28	28	28	28	28	28	28
TTL	Pearson Correlation	.670**	.650**	.768**	.688**	.670**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		28	28	28	28	28	28	28

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan kuesioner telah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, kuesioner dapat dilanjutkan pada tahap pengujian reliabilitas. Hasil uji reliabilitas berdasarkan data yang diolah dengan bantuan aplikasi Software SPSS 24 for Windows dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan	Kesimpulan
Kualitas Laporan Keuangan	0,844	0,6	0,844>0,6	Reliabel
Standar Akuntansi (PERGUB)	0,869	0,6	0,869>0,6	Reliabel
Pengawasan	0,790	0,6	0,790>0,6	Reliabel

Jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 maka kuesioner penelitian bersifat reliabel (Augustine dan Kristaung, 2013:73, Noor, 2011:165). Diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach dari variabel Kualitas Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan dapat disebarkan kepada responden untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil regresi linear sederhana untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ditunjukkan pada Tabel yang akan diberikan dibawah. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji Coefficients. Pada table coefficients yang dibaca adalah nilai dalam kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variable independen. Berdasarkan Tabel diatas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dari tabel tersebut maka diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$Y = 14.272 + 0,492 X_1 + 0,136 X_2 + e$$

Pada persamaan tersebut dapat diartikan bahwa, nilai konstanta bernilai positif, yakni 14.272 berarti implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual, pengawasan kualitas laporan keuangan, nilainya adalah sebesar 0, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilainya adalah 14.272. Nilai

koefisien regresi variabel X1 bernilai positif yaitu 0,492 berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,492 atau 49,2%. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif yaitu 0,136 berarti bahwa setiap peningkatan pengawasan kualitas laporan keuangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,136 atau 13,6%.

Tabel
Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.272	2.094		6.815	.000
	SAP (PERGUB)	.492	.051	.873	9.660	.000
	PEGAWASAN	.136	.044	.278	3.071	.005

a. Dependent Variable: KLK

Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Uji signifikansi parsial secara individu merupakan suatu uji untuk menguji apakah nilai dari koefisien regresi parsial secara individu bernilai nol atau tidak

Tabel
Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.272	2.094		6.815	.000
	SAP (PERGUB)	.492	.051	.873	9.660	.000
	PEGAWASAN	.136	.044	.278	3.071	.005

a. Dependent Variable: KLK

Variabel Penerapan Pergub Standar Akuntansi Pemerintahan (X) Nilai thitung variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 9,660 dan nilai ttabel adalah 2.01 maka thitung > ttabel (9.660 > 2.01) dan nilai signifikan (0.000 < 0.05), Pengawasan adalah 3,071 dan nilai ttabel adalah 2.01 maka thitung > ttabel (3.071 > 2.01) dan nilai signifikan (0.000 < 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengaruh variabel Penerapan Pergub Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Uji F

**Tabel
Uji F**

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111.380	2	55.690	49.136	.000 ^b
	Residual	28.335	25	1.133		
	Total	139.714	27			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), PEGAWASAN, SAP

Hasil uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 49,136 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti secara simultan seluruh variable independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan hasil uji F ternyata terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan Pergub Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UPTD Sidoarjo; 2) Semakin tinggi tingkat penerapan Pergub Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal maka semakin tinggi kualitas Laporan keuangan UPTD Sidoarjo

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. UPTD Sidoarjo perlu memperhatikan faktor faktor lain yaitu seperti sarana/prasarana didalam pengelolaan
2. keuangan yang dimiliki dan sistem akuntansi keuangan yang digunakan baik dalam pemahaman dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal yang diterapkan pada UPTD Sidoarjo.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih menyempurnakan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu diharapkan subjek penelitian tidak hanya terfokus pada satu Dinas seperti dalam penelitian ini yang terfokus hanya pada UPTD Sidoarjo, namun diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI :

- Alin Septya Dwi Inggri 2015 “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya*”. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.
- Azwar Rivai Nasution 2016 “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Hunawu, Meiling 2014 “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*”. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Syahrial Bagus Setia Budi 2017, “*Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (UPTD Sidoarjo)*”. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.
- Yuni Lindri Astuti 2017 “*Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Kabupaten Karang Anyar*”. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

BUKU :

- Abdul Hafiz Tanjung 2014 “*Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI*” Bandung. Penerbit Alfabeta,cv.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto 2015 “*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*”. Medan. Penerbit Selemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi 2014 “*Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2016 “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” Bandung. Penerbit Alfabeta,cv.

WEB :

- www.surabaya.bpk.go.id tentang laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 sampai 2015.